



Rencana Kerja Tahunan BPPMHKP Balikpapan Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP Balikpapan) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka BPPMHKP Balikpapan menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPPMHKP Balikpapan Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Balikpapan untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPPMHKP Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan BPPMHKP Balikpapan di tahun kedepannya.

Demikian RKT BPPMHKP Balikpapan Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



Balikpapan, 5 Januari 2026
Kepala BPPMHKP Balikpapan

Dr. Sulystianto, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
 Pendahuluan	 6
Latar Belakang.....	6
Tugas dan Peran Organisasi	7
Tujuan.....	8
Manfaat.....	8
Sasaran	9
 Rencana Kinerja Tahunan	 10
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	10
Arah Kebijakan	12
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	15
 Penutup	 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2026.....	15
Tabel 2. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan Tahun 2026.....	17
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP Balikpapan tahun 2026.....	20

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan BPPMHKP Balikpapan 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Permen KKP Nomor 19 Tahun 2010 terkait pengendalian mutu menjadi Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan disetiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar

area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan *surveillance*. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu BPPMHKP Balikpapan sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT BPPMHKP Balikpapan cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan BPPMHKP Balikpapan Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan BPPMHKP Balikpapan pada tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi

Kegiatan BPPMHKP Balikpapan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BPPMHKP Balikpapan adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan BPPMHKP Balikpapan Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP Balikpapan tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BPPMHKP Balikpapan pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat.
 - b) Inovasi dan Riset KP menguat.
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d) Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :

Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,

- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor .
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan Balai PPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-

kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Balai PPMHKP telah memperluas cakupan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi Balai

PPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan Balai PPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai PPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP.
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan

antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai PPMHKP Balikpapan telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, oleh karena itu Balai PPMHKP Balikpapan telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP Balikpapan TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT BKIPM Balikpapan (%)	70

		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT BKIPM Balikpapan (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Nilai)	75
		5	Nilai kualitar penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Nilai)	71,2
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT BKIPM Balikpapan (%)	100
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balikpapan (Nilai)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Indeks)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BKIPM Balikpapan (%)	85

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT BKIPM Balikpapan (%)	76
		13	Perentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balikpapan (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BKIPM Balikpapan (Nilai)	88

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPMHKP Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2026
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	71
SK.3	Tatakelola Pemerintahan yang	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	82,5

efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan	5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	77
	6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	86,5
	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Persen)	86
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	92,1
	9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	71,75
	10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	77
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	3,5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT. Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standar dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu

lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan mutu ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan dari hulu ke hilir.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja BPPMHKP tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai PPMHKP Balikpapan tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 6.059.238.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai PPMHKP Balikpapan untuk

mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai PPMHKP Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	231.750.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	86.000.000
3.	Dukuman Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Penagawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	5.741.488.000
Total Anggaran BPPMHKP Balikpapan Tahun 2025		6.059.238.000

Penutup

Rencana kerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada T.A 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan BPPMHKP Balikpapan antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Dukuman Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Penagawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan pada tahun 2026 sebesar **Rp. 6.059.238.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 5.741.488.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 86.000.000,-**
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 231.750.000,-**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eko Sulystianto**

Jabatan : Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Balikpapan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Eko Sulystianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	231.750.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	86.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	5.741.488.000
Total Anggaran Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026		6.059.238.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Balikpapan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Eko Sulystianto

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(567610)

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 6,059,238,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
032.13.EC 3989	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			317,750,000 231,750,000		
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	35.0 produk		131,000,000		

3989.PDC.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	35.0 produk		131,000,000		
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			131,000,000	U	
A	Prosentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan			20,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan)			3,430,000		PNP
	- Makan Rapat Biasa	40.0 OK	48,000	1,920,000		SBM
	- Snack Rapat Biasa	40.0 OK	27,000	1,080,000		SBM
	- Perlengkapan Koordinasi	1.0 PKT	430,000	430,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			15,550,000		PNP
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Distribusi Ikan yang Baik			10,160,000		
	- Transport [2 UNIT x 2 KALI]	4.0 OK	975,000	3,900,000		
	- Penginapan	2.0 OH	550,000	1,100,000		
	- Uang Harian	12.0 OH	430,000	5,160,000		SBM
	> Forum Konsultasi Publik SPDI			5,390,000		
	- Transport	1.0 OK	2,600,000	2,600,000		SBM
	- Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	765,000	1,530,000		SBM
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	420,000	1,260,000		SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan)			1,020,000		PNP
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Distribusi Ikan yang Baik			1,020,000		
	- Uang Harian Inspeksi / Verifikasi Balikpapan [2 ORG x 3 UNIT x 1 KALI x 1 HARI]	6.0 OH	170,000	1,020,000		SBM
B	Presentase Sertifikat Kelayakan Pengelohan (SKP) diterbitkan pada UPI skala UMKM dan Menengah Besar			32,500,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			27,740,000		PNP
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Kelayakan Dasar			19,020,000		
	- Penginapan Inspeksi/Verifikasi [2 HARI x 3 KALI]	6.0 OH	550,000	3,300,000		
	- Uang Harian Inspeksi/Verifikasi	24.0 OH	430,000	10,320,000		
	- Transport [6 UNIT x 1 KALI]	6.0 OK	900,000	5,400,000		
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Kelayakan Dasar (Berau)			8,720,000		
	- Penginapan Inspeksi/Verifikasi Berau [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OH	650,000	1,300,000		
	- Transport Inspeksi/Verifikasi Berau [2 ORG x 1 UNIT x 1 KALI]	2.0 OK	2,420,000	4,840,000		
	- Uang Harian Inspeksi / Verifikasi [2 ORG x 1 UNIT x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	430,000	2,580,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(567610)

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 6,059,238,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	524113 <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan)			4,760,000	PNP
	- Uang Harian Inspeksi/Verifikasi Balikpapan [2 ORG x 7 UNIT x 2 KALI x 1 HARI]	28.0 OH	170,000	4,760,000	
	<i>Jumlah Sertifikat HACCP Ruang Lingkup Produk pada UPI</i>			28,500,000	RM
	524111 <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan)			24,080,000	
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Samarinda)			1,130,000	SBM
	- Transport Inspeksi HACCP Samarinda [1 UPI x 1 KALI]	1.0 OK	270,000	270,000	
	- Uang Harian Inspeksi HACCP Samarinda [2 ORG x 1 UPI x 1 HARI]	2.0 OH	430,000	860,000	
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Bontang)			2,535,000	
	- Transport Inspeksi HACCP Bontang [1 ORG x 1 KALI]	1.0 OK	265,000	265,000	
	- Uang Harian Inspeksi HACCP Bontang [2 ORG x 1 UPI x 2 HARI]	4.0 OH	430,000	1,720,000	
	- Biaya Penginapan [1 UPI x 1 HARI x 1 KALI]	1.0 OH	550,000	550,000	
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Berau)			9,790,000	
	- Transport Inspeksi HACCP Berau [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	2,200,000	4,400,000	
	- Uang Harian Inspeksi HACCP Berau [2 ORG x 4 HARI]	8.0 OH	430,000	3,440,000	
	- Biaya Penginapan Inspeksi HACCP Berau [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	3.0 OH	650,000	1,950,000	
	> Surveilen Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Samarinda)			1,125,000	
	- Transport Surveilen HACCP Samarinda [1 UPI x 1 KALI]	1.0 OK	265,000	265,000	
	- Uang Harian Surveilen HACCP Samarinda [2 ORG x 1 UPI x 1 HARI]	2.0 OH	430,000	860,000	
	> Surveilen Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Kutai Kartanegara)			2,100,000	
	- Transport Surveilen HACCP Kutai Kartanegara [2 UPI x 1 KALI]	2.0 OK	190,000	380,000	
	- Uang Harian Surveilen HACCP Kutai Kartanegara [2 ORG x 2 UPI x 1 HARI]	4.0 OH	430,000	1,720,000	
	> Pelatihan Noreg HACCP			7,400,000	
	- Transport	1.0 OK	2,700,000	2,700,000	SBM
	- Biaya Penginapan [1 ORG x 4 HARI]	4.0 OH	575,000	2,300,000	SBM
	- Uang Harian [1 ORG x 5 HARI]	5.0 OH	480,000	2,400,000	SBM
D	524113 <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan)			4,420,000	RM
	- Surveilen Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP Balikpapan	4.0 OH	170,000	680,000	PNP
	- Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP Balikpapan	22.0 OH	170,000	3,740,000	
	<i>Bahan Laboratorium</i>			50,000,000	
	521811 <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.047-Balikpapan)			50,000,000	PNP
	- Bahan Laboratorium	1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	31.0 Lembaga, Badan Usaha		88,750,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	31.0 Lembaga		88,750,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			88,750,000	U
A	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan			58,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan)			600,000	RM
	> Koordinasi Sertifikasi Produksi Primer ke Pelaku Usaha			600,000	
	- Snack Rapat Biasa	25.0 OK	24,000	600,000	SBM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			55,360,000	RM
	> Inspeksi Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Kutai Kartanegara)			15,240,000	
	- Uang Harian CBIB Kutai Kartanegara [3 ORG x 2 KALI x 3 HARI]	18.0 OH	430,000	7,740,000	
	- Transport CBIB Kutai Kartanegara [3 KALI]	3.0 OK	1,400,000	4,200,000	
	- Penginapan CPIB Kutai Kartanegara [3 KALI x 2 HARI]	6.0 OH	550,000	3,300,000	
	> Inspeksi Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Samarinda)			4,880,000	
	- Uang Harian CBIB Samarinda [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Transport CBIB Samarinda [1 KALI]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
	- Penginapan CPIB Samarinda [1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	650,000	1,300,000	
	> Inspeksi / Surveil Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Grogot)			14,860,000	
	- Uang Harian CBIB Grogot [2 ORG x 2 KALI x 4 HARI]	16.0 OH	430,000	6,880,000	SBM
	- Penginapan CBIB Grogot [3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	500,000	3,000,000	SBM
	- Transport CBIB Grogot	2.0 OK	2,490,000	4,980,000	
	> Inspeksi / Surveil Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Berau)			20,380,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas CBIB Berau [2 ORG x 2 KALI x 4 HARI]	16.0 OH	430,000	6,880,000	SBM
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Berau [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OK	2,400,000	9,600,000	SBM
	- Biaya Penginapan CBIB Berau [3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	650,000	3,900,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan)			2,040,000	RM
	- Inspeksi Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB Balikpapan [3 ORG x 4 UNIT x 1 KALI]	12.0 OH	170,000	2,040,000	SBM
B	Sertifikasi CPIB Pada Pembenihan			7,950,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Pembenihan Ikan yang Menerapkan CPIB Samarinda - Uang Harian CPIB Samarinda [2 ORG x 1 KALI x 2 HARI] - Transport CPIB Samarinda [1 KALI] - Penginapan CPIB Kutai Kartanegara [1 KALI x 1 HARI] > Inspeksi Pembenihan Ikan yang Menerapkan CPIB Kutai Kartanegara - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [2 ORG x 1 KALI x 2 HARI] - Satuan Biaya Transportasi Darat - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [1 KALI x 1 HARI]	4.0 OH 1.0 OK 1.0 OH 4.0 OH 1.0 OK 1.0 OH	430,000 1,000,000 630,000 430,000 1,600,000 600,000	7,270,000 3,350,000 1,720,000 1,000,000 630,000 3,920,000 1,720,000 1,600,000 600,000	RM SBM SBM SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Inspeksi Pembenihan Ikan yang Menerapkan CPIB Balikpapan [2 ORG x 2 UNIT x 1 KALI]	4.0 OH	170,000	680,000	RM SBM
C	<i>Sertifikasi CPPIB pada Usaha Produksi Pakan Ikan</i>			5,650,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Usaha Produksi Pakan Ikan yang Menerapkan CPPIB - Uang Harian CPPIB [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI] - Transport CPPIB [1 KALI] - Penginapan CPPIB [2 HARI x 1 KALI]	6.0 OH 1.0 OK 2.0 OH	430,000 1,770,000 650,000	5,650,000 2,580,000 1,770,000 1,300,000	RM
D	<i>Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan</i>			17,150,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Menerapkan CPIB (Berau) - Uang Harian CPIB Berau [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI] - Penginapan CPIB Berau [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI] - Transport Berau [2 ORG x 1 KALI] > Inspeksi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Menerapkan CPIB - Uang Harian CPIB [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI] - Penginapan CPIB [2 HARI x 1 KALI] - Transport CPIB [1 KALI]	6.0 OH 4.0 OH 2.0 OK 6.0 OH 2.0 OH 1.0 OK	430,000 650,000 2,500,000 430,000 650,000 1,560,000	15,620,000 10,180,000 2,580,000 2,600,000 5,000,000 5,440,000 2,580,000 1,300,000 1,560,000	RM SBM SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Inspeksi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Menerapkan CPIB [3 ORG x 3 UNIT x 1 KALI]	9.0 OH	170,000	1,530,000	RM SBM
3989.QIC	<u>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]</u>	17.0 Lembaga		12,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.0 Lembaga		5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(567610)	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 6,059,238,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			5,000,000	U
A	Evaluasi Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolah Ikan			5,000,000	
521211	Belanja Bahan			5,000,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	> Evaluasi Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolah Ikan			5,000,000	
	- Spanduk	2.0 PKT	487,500	975,000	
	- Perlengkapan	2.0 PKT	700,000	1,400,000	
	- Makan Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR [35 ORG x 2 KAL]	70.0 OK	37,500	2,625,000	SBM
3989.QIC.003	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	7.0 Lembaga		7,000,000	
051	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			7,000,000	U
A	Jumlah Unit Produksi Primer yang Konsisten Menerapkan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			7,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			5,650,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Bahan Uji Mutu	1.0 PKT	5,650,000	5,650,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			1,350,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	> Sub Kontrak Pengujian ke Laboratorium Eksternal			1,350,000	
	- Uji Logam Berat	1.0 PKT	1,350,000	1,350,000	
7010	Manajemen Mutu			86,000,000	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan		45,500,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		45,500,000	
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			45,500,000	U
A	Pelaksanaan SJMHKP Dalam Rangka Quality Assurance Produk Hasil Perikanan			45,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			24,000,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Biaya Petanggunggugatan ISO 17020	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	
	- Iuran Tahunan ISO 17020	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Blaya Surveilien KAN ISO 17020 [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	3,500,000	14,000,000	
	- Pendaftaran 17020	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan) > Perjalanan Asesor - Penginapan [2 ORG x 2 HARI] - Transport - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI] - Transportasi Lokal [2 ORG x 1 KALI] > Pelatihan 17020 - Penginapan - Transport - Uang Harian [1 ORG x 2 HARI]			21,500,000 15,720,000 3,400,000 7,740,000 2,580,000 2,000,000 5,780,000 850,000 3,870,000 1,060,000	PNP
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga		40,500,000	
7010.PDD.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		40,500,000	U
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			40,500,000	
A	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu			40,500,000	PNP
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.047-Balikpapan) - Uji Profisiensi - Uji Banding - Pemeliharaan Panelis > Reakreditasi 17025 - Pelaksanaan Assessment ISO 17025 [2 ORG x 2 HARI] - Biaya Pendaftaran - Iuran Tahunan 17025	2.0 PKT 2.0 PKT 1.0 PKT 4.0 OH 1.0 PKT 1.0 PKT	1,500,000 400,000 1,000,000 3,500,000 5,000,000 1,500,000	3,000,000 800,000 1,000,000 20,500,000 14,000,000 5,000,000 1,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan) > Perjalanan Asesor - Penginapan [2 ORG x 2 HARI] - Transport Pesawat - Transport Lokal [2 ORG x 1 KALI] - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI]			15,200,000 15,200,000 3,200,000 7,600,000 1,820,000 2,580,000	PNP
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			5,741,488,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			5,741,488,000	U
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,741,488,000	
3987.EBA.962	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Layanan Umum	1.0 Layanan		198,850,000	U
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			198,850,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Layanan Umum dan RT			81,605,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan)			2,105,000	RM
	> Kearsipan			2,105,000	
	- Makan Rapat Pemusnahan Arsip [15 ORG x 1 KALI]	15.0 OK	28,000	420,000	
	- Snack Rapat Pemusnahan Arsip [15 ORG x 1 KALI]	15.0 OK	20,000	300,000	
	- Perlengkapan Kearsipan	1.0 PKT	1,385,000	1,385,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.047-Balikpapan)			6,000,000	RM
	- Honor Instruktur Olahraga/Penceramah [1 ORG x 1 KALI x 12 BLN]	12.0 OJ	500,000	6,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			73,500,000	RM
	> Perjalanan Dinas Arsiparis			5,990,000	
	- Transport	1.0 OK	3,000,000	3,000,000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	700,000	1,400,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	530,000	1,590,000	SBM
	> Penyusunan RKBMN			14,440,000	
	- Transport [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	3,000,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	700,000	4,200,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 4 HARI x 1 KALI]	8.0 OH	530,000	4,240,000	
	> Perjalanan Dinas Non Teknis			45,850,000	
	- Transport [1 ORG x 7 KALI]	7.0 OK	3,460,000	24,220,000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 7 KALI]	14.0 OH	750,000	10,500,000	
	- Uang Harian [3 HARI x 7 KALI]	21.0 OH	530,000	11,130,000	
	> Konsultasi / Koordinasi ke Kanwil			7,220,000	
	- Transport	4.0 OK	945,000	3,780,000	
	- Uang Harian	8.0 OH	430,000	3,440,000	
B	Koordinasi dengan Instansi Terkait			52,620,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			52,620,000	RM
	> Perjalanan Dinas ke Propinsi			15,060,000	
	- Transport [10 KALI]	10.0 OK	689,000	6,890,000	
	- Uang Harian	19.0 OH	430,000	8,170,000	
	> Perjalanan Konsultasi / Koordinasi ke Pusat			37,560,000	
	- Transport [1 ORG x 6 KALI]	6.0 OK	3,500,000	21,000,000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 6 KALI]	12.0 OH	850,000	10,200,000	
	- Uang Harian [2 HARI x 6 KALI]	12.0 OH	530,000	6,360,000	
C	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran			59,655,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan)			59,655,000	RM
	> Perjalanan Rekon Keuangan SAI dan BMN			25,560,000	
	- Transport [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OK	3,400,000	13,600,000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	700,000	5,600,000	
	- Uang Harian Rekon Keuangan [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	12.0 OH	530,000	6,360,000	SBM
	> Penyusunan / Finalisasi RKAKL			19,970,000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	530,000	4,770,000	
	- Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	850,000	1,700,000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	750,000	3,000,000	
	- Transport [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OH	3,500,000	10,500,000	
	> Perjalanan Dialog Kerja			14,125,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	530,000	3,180,000	
	- Transport [1 ORG x 2 KALI]	2.0 OH	3,772,500	7,545,000	
	- Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	850,000	3,400,000	
D	<i>Maintenance WBK/Pelayanan Publik</i>			4,970,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.047-Balikpapan)			4,970,000	RM
	- Bahan Pendukung Pelayanan Publik/PPID	1.0 PKT	4,010,000	4,010,000	
	> Maintenance WBK			960,000	
	- Snack Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	20,000	400,000	
	- Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	28,000	560,000	
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,542,638,000	
001	Gaji dan Tunjangan			4,370,002,000	U
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS</i>			2,933,706,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan)			979,532,000	RM
	- Gaji Pokok PNS	1.0 THN	839,000,000	839,000,000	
	- Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	67,632,000	67,632,000	
	- Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	72,900,000	72,900,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan)			14,000	RM
	- Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	12,000	12,000	
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan)			73,000,000	RM
	- Tunjangan Suami / Istri PNS	1.0 THN	62,000,000	62,000,000	
	- Tunjangan Suami / Istri PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	5,000,000	5,000,000	
	- Tunjangan Suami / Istri PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	6,000,000	6,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Anak PNS - Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	21,000,000 1,700,000 1,900,000	24,600,000 21,000,000 1,700,000 1,900,000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Struktural PNS - Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	23,760,000 1,800,000 2,340,000	27,900,000 23,760,000 1,800,000 2,340,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Fungsional PNS - Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	44,000,000 3,580,000 3,580,000	51,160,000 44,000,000 3,580,000 3,580,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan PPh PNS - Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	2,000,000 5,000,000 5,000,000	12,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Beras PNS - Tunjangan Beras PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Beras PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	44,000,000 4,000,000 3,600,000	51,600,000 44,000,000 4,000,000 3,600,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	170,000,000	170,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Umum PNS - Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	20,000,000 1,700,000 1,700,000	23,400,000 20,000,000 1,700,000 1,700,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Uang Lembur Pegawai	1.0 THN	190,000,000	190,000,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	1.0 THN	1,330,500,000	1,330,500,000	RM
B	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK</u>			1,436,296,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			601,400,000	RM
	- Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	539,200,000	539,200,000	
	- Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	31,100,000	31,100,000	
	- Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	31,100,000	31,100,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			16,000	RM
	- Pembulatan Gaji Pokok	1.0 THN	16,000	16,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			43,720,000	RM
	- Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	37,320,000	37,320,000	
	- Tunjangan Suami/Istri PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	3,200,000	3,200,000	
	- Tunjangan Suami/Istri PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	3,200,000	3,200,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			8,708,000	RM
	- Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	7,464,000	7,464,000	
	- Tunjangan Anak PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	622,000	622,000	
	- Tunjangan Anak PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	622,000	622,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			32,452,000	RM
	- Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	27,816,000	27,816,000	
	- Tunjangan Beras PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	2,318,000	2,318,000	
	- Tunjangan Beras PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	2,318,000	2,318,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			104,000,000	RM
	- Uang Makan PPPK	1.0 THN	104,000,000	104,000,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			28,000,000	RM
	- Tunjangan Umum PPPK	1.0 THN	24,000,000	24,000,000	
	- Tunjangan Umum PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000,000	2,000,000	
	- Tunjangan Umum PPPK (Gaji ke 14)	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			70,000,000	RM
	- Uang Lembur PPPK	1.0 THN	70,000,000	70,000,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan)			548,000,000	RM
	- Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.0 THN	548,000,000	548,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,172,636,000	U
A	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>247,800,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan)			54,000,000	RM
	- Langganan Jasa Internet	12.0 BLN	4,500,000	54,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.047-Balikpapan)			180,000,000	RM
	- Pembayaran Listrik	12.0 BLN	15,000,000	180,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.047-Balikpapan)			1,800,000	RM
	- Pembayaran Telepon	12.0 BLN	150,000	1,800,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.047-Balikpapan)			12,000,000	RM
	- Pembayaran Air	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
B	<i>Perawatan Kendaraan Bermotor</i>			289,980,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan)			12,500,000	RM
	- Pengurusan STNK/Pajak Mobil Dinas	6.0 UNIT	1,500,000	9,000,000	
	- Pengurusan STNK/Pajak Motor Dinas	10.0 UNIT	350,000	3,500,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.047-Balikpapan)			277,480,000	2 RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Kalimantan Timur)	1.0 UNIT	39,480,000	39,480,000	*
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kalimantan Timur)	5.0 UNIT	37,360,000	186,800,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Kalimantan Timur)	10.0 UNIT	5,120,000	51,200,000	
C	<i>Perawatan Gedung</i>			77,060,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.047-Balikpapan)			77,060,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Induk dan Pelayanan	230.0 m2	242,000	55,660,000	
	- Pemeliharaan Internet/Server	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Induk	200.0 m2	10,000	2,000,000	
	- Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Lainnya	72.0 M2	200,000	14,400,000	
D	<i>Operasional Perkantoran</i>			229,320,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan)			60,000,000	RM
	- Belanja Keperluan Rumah Tangga Perkantoran	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.047-Balikpapan)			2,400,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat / Paket Dinas	12.0 BLN	200,000	2,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.047-Balikpapan)			82,920,000	RM
	> Honor Pengelola Anggaran			56,520,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,180,000	14,160,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,150,000	13,800,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	410,000	4,920,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	300,000	7,200,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	300,000	10,800,000	SBM
	> Honor Pengelola PNBp			5,520,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	260,000	3,120,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp1 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	> Honor Pengelola SAI (SAKPA dan BMN)			20,880,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	SBM
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	SBM
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	180,000	4,320,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	SBM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.047-Balikpapan)			35,000,000	RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Kurang 40 Pegawai (Kalimantan Timur)	1.0 OT	35,000,000	35,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.047-Balikpapan)			49,000,000	RM
	- Sewa Tempat Penyimpanan Arsip	1.0 THN	49,000,000	49,000,000	
E	<u>Outsourcing</u>			72,800,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan)			72,800,000	RM
	- Tenaga Outsourcing	1.0 THN	72,800,000	72,800,000	
F	<u>Pengadaan Pakaian Dinas</u>			31,296,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan)			31,296,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai [32 STELL x 1 KALI]	32.0 STEL	978,000	31,296,000	SBM
G	<u>Pengadaan Daya Tahan Tubuh</u>			57,456,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(567610)
Rp. 6,059,238,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			57,456,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [12 ORG x 21 HARI x 12 BLN]	3024.0 OH	19,000	57,456,000	
H	Pas Pelabuhan Laut / Bandara			4,000,000	RM
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			4,000,000	
	(KPPN.047-Balikpapan)				
I	- Pembuatan PAS Bandara Kendaraan Roda 4	5.0 UNIT	300,000	1,500,000	RM
	- Pembuatan PAS Orang	10.0 PEG	250,000	2,500,000	
	Pertemuan / Delegasi / Tamu			68,000,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			68,000,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
J	- Jamuan Makan	1.0 THN	68,000,000	68,000,000	
	Perawatan Sarana Gedung			94,924,000	RM
	Belanja Keperluan Perkantoran			8,264,000	
521111	(KPPN.047-Balikpapan)				
522191	- Perpanjangan Lisensi Aplikasi	1.0 THN	8,264,000	8,264,000	RM
	Belanja Jasa Lainnya			35,000,000	
	(KPPN.047-Balikpapan)				
523121	- Perawatan / Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 PKT	35,000,000	35,000,000	RM
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			51,660,000	
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Komputer / Laptop	27.0 UNIT	730,000	19,710,000	RM
	- Printer	19.0 UNIT	300,000	5,700,000	
	- AC	33.0 UNIT	500,000	16,500,000	
	- Barang Inventaris Kantor	32.0 PEG	80,000	2,560,000	
	- Genset 25 KVA	1.0 UNIT	7,190,000	7,190,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Balikpapan, 12 Desember 2025
Kepala

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP 197002111997031003